



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MICHAEL ANDREAS PURWOADI
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 101177

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 18.214.111.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 245 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 10.874.125.000
2. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 993.045.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 346.941.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 555.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA FL DIESEL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, GEELY EX-5 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 475.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.098.640.154



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.229.984.202

F. HARTA LAINNYA

Rp. 66.454.685

Sub Total

Rp. 26.639.190.041

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 26.639.190.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.